



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAKAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
LAMAM www.kkp.go.id

15 April 2025

Yth. Kepala BPPMHKP
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.63/BKIPM.MTR/TU.210/IV/2025

No	Dokumen yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Mataram	1 (satu) buku	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram**
Jl. Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya,
Kec. Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
0370-6194701



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Balai KIPM Mataram dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 dengan tepat waktu.

LKj Triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Mataram selama triwulan I tahun 2025.

LKj ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran kegiatan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai KIPM Mataram yang merupakan penjabaran dari target kinerja tahun 2025.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Seperti halnya triwulan IV tahun 2024 terkait SOTK baru tentang perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Sehingga mengakibatkan perubahan dokumen kinerja terutama Perjanjian Kinerja yang mengalami revisi pada bulan Oktober 2024.

Semoga LKj Triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Mataram ini dapat menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Mataram, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi seluruh jajaran Balai KIPM Mataram agar memacu kinerja ke depan agar lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Mataram, 14 April 2025
plt. Kepala Balai KIPM Mataram,

M. Farchan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Organisasi	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	6
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Analisis dan Evaluasi	11
3.3 Realisasi Anggaran	44
BAB IV. Penutup	46
Lampiran-lampiran	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025	6
Tabel 3.1	Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja	8
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IKS.1	14
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IKS.2	17
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IKS.3	19
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IKS.4	21
Tabel 3.7	Target dan Realisasi IKS.5	23
Tabel 3.8	Target dan Realisasi IKS.6	26
Tabel 3.9	Target dan Realisasi IKS.7	29
Tabel 3.10	Target dan Realisasi IKS.8	30
Tabel 3.11	Target dan Realisasi IKS.9	34
Tabel 3.12	Target dan Realisasi IKS.10	36
Tabel 3.13	Target dan Realisasi IKS.11	38
Tabel 3.14	Target dan Realisasi IKS.12	39
Tabel 3.15	Target dan Realisasi IKS.13	40
Tabel 3.16	Target dan Realisasi IKS.14	41
Tabel 3.17	Kategorisasi Kepuasan Pelayanan	43
Tabel 3.18	Target dan Realisasi IKS.15	44
Tabel 3.19	Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan I T.A. 2025	45
Tabel 3.20	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I T.A. 2025	45





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram	5
Gambar 2	Dashboard Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025	9
Gambar 3	Persentase TLHP Balai KIPM Mataram pada Triwulan I Tahun 2025	37
Gambar 4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram	43





IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja IKU dan IKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 114,62. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja Balai KIPM Mataram yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, ada 6 indikator kinerja yang terdapat target pada triwulan I, seluruh indikator telah tercapai sesuai target dan/atau melebihi target dengan perhitungan data nilai posisi akhir.
- B. Uraian capaian indikator kinerja dengan target triwulanan:
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Ditargetkan pada triwulan I 70% dan tercapai 100% atau dalam persentase kinerja 120%;
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Terealisasi 100% dari target 70% pada triwulan I atau setara dengan 120% persentase kinerja;
 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Tercapai 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01% persentase kinerja;
 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 100% dari target 85%, atau tercapai 117,65% dalam persentase kinerja.;
 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 99,06% dari target 76%, atau tercapai 120% dalam persentase kinerja;
 6. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (nilai). Ditargetkan 99 dan tercapai 95,95 atau dengan persentase 109,03%.
- C. Uraian capaian indikator kinerja dengan target semester dan tahunan:
1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup



- UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram, target semester I nilai 85 dan semester II target 92.;
 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 71,5 (nilai);
 5. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 100%;
 6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (indeks), dengan target semester I nilai 81 dan target semester II nilai 87;
 7. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 82 (nilai) tercapai 83,60 atau dengan persentase 101,95%;
 8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%) dengan target tahunan 70%;
 9. Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (unit) dengan target 1 inovasi/unit.

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 1.381.325.675 atau mencapai 16,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN, jumlah total penerimaan PNBPN sampai triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.150.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 18,87%. Pencapaian PNBPN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga dipengaruhi adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SIAPMUTU serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj



Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Mataram berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Mataram.

1.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Mataram mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian,



berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Mataram mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- 2) Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- 3) Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Mataram perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Mataram secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Mataram:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Mataram menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

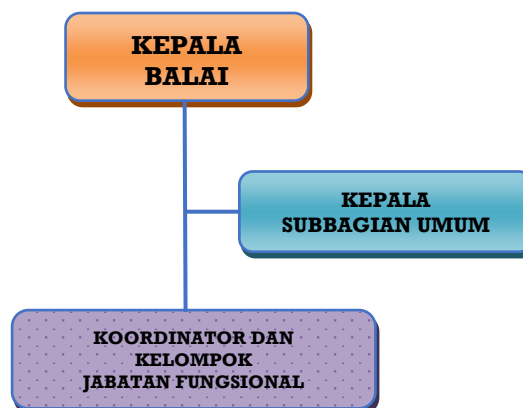
2. Struktur organisasi Balai KIPM Mataram

Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Mataram mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 19 orang ASN, yang terdiri dari 16 orang PNS dan 3 orang tenaga PPPK dengan komposisi pegawai 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram *



*Berdasarkan Permen KP Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Balai KIPM Mataram, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen PK Tahun 2025 Balai KIPM Mataram.

3.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99



SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan pengukuran kinerja Balai KIPM Mataram, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun output yang dihasilkan aplikasi paling sedikit meliputi:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Skor Kinerja Organisasi; dan
2. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU dan IKM) Organisasi.

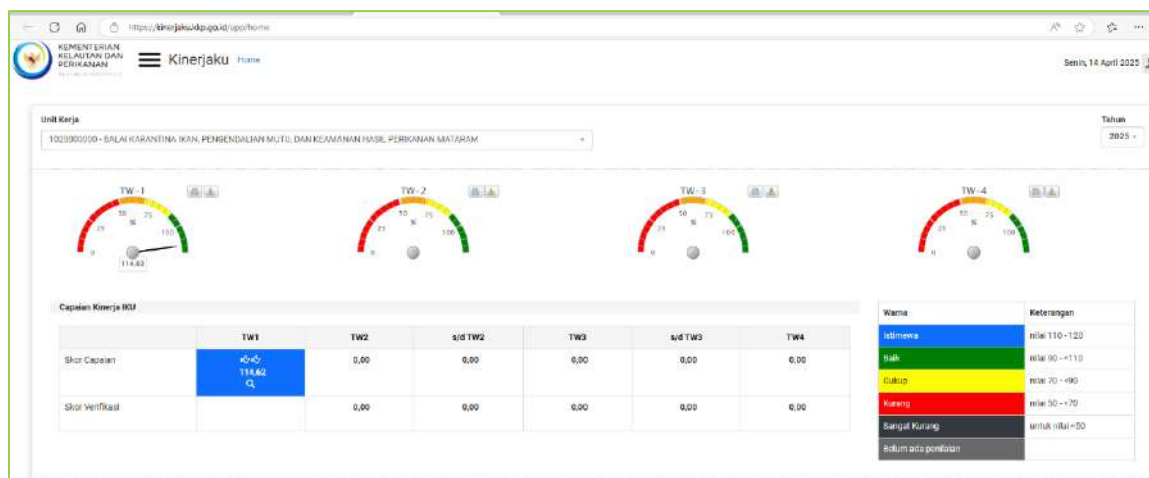
Pencapaian kinerja untuk setiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku diklasifikasikan dengan warna berdasarkan status kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Capaian kinerja Balai KIPM Mataram sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masuk dalam klasifikasi capaian “Istimewa”, hal ini ditandai dengan Skor Kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,62 dan ditandai dengan warna biru seperti ditampilkan gambar *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Mataram berikut ini.

Gambar 2
Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan I Tahun 2025



Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Balai KIPM Mataram yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI TW I %	% thd TARGET 2025
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99%	99%	100% 101,01%	101,01%
Kegiatan 2. Kegiatan Manajemen Mutu							
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	-	-	-



	keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	-	-	-

KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal

SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92	-	-	-
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5	-	-	-
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100%	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85%	85%	100% 117,65%	117,65%
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76%	76%	99,06% 120%	120%
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	-	-	-
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88	88	95,95 109,03%	109,03%



3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir).

Sasaran Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 1 secara rinci sebagai berikut:

IKS.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku



Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Pada triwulan I tahun 2025, sektor produksi primer lingkup Balai KIPM Mataram terdapat realisasi sertifikat CBIB sebanyak 1 sertifikat dan sertifikat CDOIB sebanyak 1 sertifikat atau tercapai 100% dari target 70% atau dengan persentase sebesar 120%. Untuk triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak ada capaian karena indikator ini mulai digunakan pada triwulan IV tahun 2024.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram”:

- **CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik):**

Target Sertifikat CBIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CBIB = 1 sertifikat

Persentase Capaian (A) = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

- **CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPIB = 0

Capaian Sertifikat CPIB = 0



$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (C)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (D)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CDOIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CDOIB = 1 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (E)} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal)**

Target Sertifikat CPIB Kapal = 0

Capaian Sertifikat CPIB Kapal = 0

$$\text{Persentase Capaian (F)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator IK01:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator ini mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 125.000.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKS.I

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	-	70%	100%	120	100%	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);



2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT*

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018, Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011, dan



Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point*.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP

Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:

- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. kopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi *Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM belum ada.



Sedangkan realisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada triwulan I tahun 2025 tercapai 11 sertifikat atau tercapai 100%.

Berikut penghitungan capaian indikator ini:

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 0

Capaian Sertifikat HACCP = 0

$$\text{Persentase Capaian (A)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

SKP

Target Sertifikat SKP = 11 sertifikat

Capaian Sertifikat SKP = 11 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator IK02:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi, capaian indikator “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan” triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dari target 70% atau dengan capaian persentase kinerja sebesar 120%.

Indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi indikator kinerja di triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000 atau sama dengan 2,48% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKS.2

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisas thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	-	70%	100%	120	100%	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut



Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 HC Mutu yang terbit sebanyak 21 sertifikat (Lampiran IKS.3) dan seluruhnya tidak ada penolakan dari negara tujuan ekspor.

Formula untuk menghitung capaian indikator:

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram = 21 HC Mutu



B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

Capaian indikator:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A-B}{A} \times 100\% \\ &= \frac{21-0}{21} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Indikator ini baru di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada triwulan IV tahun 2024.

Dari perhitungan capaian indikator ini pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 53.000.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKS.3

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	-	-	100	100	-	99%	100%	101,01	100%	99%	101,01	98%	99%	101,01

Ket. : Tahun 2021-2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 2. Manajemen Mutu

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 2 secara rinci sebagai berikut:

IKS.4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kulaitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n



n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 111.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.500.000 atau setara dengan 1,35% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi IKS.4

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	84,85%	-	-	75%	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajmen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.



ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 45.000.000,- dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKS.5

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	81,35%	-	-	75%	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 3 secara rinci sebagai berikut:

IKS.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau

- Kurang, apabila nilai IKPA >70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

Pengelolaan UP - Bobot 10%

$$\frac{\sum SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}{\sum SPM GUP} \times 100$$

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:



Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times \frac{1}{n}$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Perhitungan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Capaian indikator ini dihitung semesteran dan ditargetkan nilai 85 pada semester I dan 92 pada semester II.

Sedangkan tahun 2024 indikator Nilai IKPA ditargetkan 83 pada Semester I dan pada Semester II 93,76. Triwulan II tahun 2024 atau semester I tahun 2024



Nilai IKPA Balai KIPM Mataram tercapai 89,54 atau mencapai 107,88% dari target dan pada triwulan IV atau semester II tahun 2024 tercapai 94,92 dengan persentase capaian 101,24%.

Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.483.600 atau setara dengan 1,32%.

Perbandingan capaian indikator pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi IKS.6

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
95,98	98,18	96,71	97,84	94,92	-	-	-	-	-	92	-	88	90	-

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Mataram

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besaran pagu pada DIPA masing-masing K/L, yaitu kategori Pagu Besar (pagu lebih besar atau sama dengan Rp 10 triliun); kategori Pagu Sedang (pagu Rp 2,5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 10 triliun); dan kategori Pagu Kecil (pagu kurang dari Rp 2,5 triliun).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini juga menjadi salah satu unsur utama dalam penerapan kebijakan penghargaan dan/atau sanksi kepada K/L sebagaimana diatur



dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan evaluasi kinerja anggaran di seluruh K/L. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui pengukuran dan penilaian atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya menggunakan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis



2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

$NEf\ Satker$: Nilai Efektivitas Satker

$RVRO_i$: Realisasi Volume RO i

$TVRO_i$: Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisienst SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

$NKA\ UEI$: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

$CIKP$: Capaian Indikator Kinerja Program

NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker

W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

$WNEf_{satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Penilaian evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan periode tahunan dengan target 82 pada tahun 2023 yang merupakan target mandatori perubahan Perjanjian Kinerja dari sebelumnya 86. Realisasi indikator ini adalah 86,71 atau dengan persentase 105,74%.

Sedangkan pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan dengan nilai 82. Namun, sesuai dengan perubahan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang terjadi pada triwulan IV tahun 2024, indikator NKA diganti menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target nilai 71.

Pada tahun 2025 NKPA ditargetkan 71,5 dengan periode pelaporan tahunan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dari Efektivitas Capaian RO dan Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan pembobotan sebagai berikut:

NKA Satker

NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15



Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.483.600 atau setara dengan 1,32%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi IKS.7

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	96,06	-	-	-	-	-	71,5	-	-	71	-

Ket.: Tahun 2020-2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditargetkan tahunan dengan target 100% dan diukur dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram}}$$

Selama Tahun 2024 tidak ada audit BPK di Balai KIPM Mataram. Jadi, capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator ini sebesar Rp.44.856.000 dan tercapai 100% dari pagu anggaran.



Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi IKS.8

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-

Ket. : Tahun 2020- 2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Berikut ini adalah tabel pengkategorian nilai IP ASN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP ASN.

Pengukuran komponen kualifikasi dikategorikan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					Dibawah SLTA
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Stuktural
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Perhitungan Komponen Diklat 20JP, Diklat Fungsional, dan Seminar

Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai dan MyASN.

Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.

Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.

Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:

- Workshop,
- Pelatihan Manajerial,
- Pelatihan Sosio Kultural,



- d. Sosialisasi, dan
- e. Bimbingan Teknis.

Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai	Nilai	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP-ASN. Pengukuran komponen kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja dikategorikan sebagai berikut:

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1



Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP ASN. Terdapat perubahan formula perhitungan dimana riwayat hukuman disiplin dihitung 1 (satu) tahun terakhir.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai Diklat PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Capaian IK ini dihitung semesteran. Target Semester I adalah 81 dan Semester II adalah 87.

Capaian IK Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2024 adalah 89,34 atau tercapai 110,30% dan semester II tahun 2024 tercapai 93,73 atau dengan persentase 108,99% dari target.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp. 4.377.798.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.083.867.724 atau setara dengan 24,76% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 | Target dan Realisasi IKS.9

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
73	82,98	82,8	90,44	93,73	-	-	-	-	-	-	-	72	76	-



Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Mataram

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pada Tahun 2025, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, Unit Organisasi Level I lingkup KKP dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Unit Organisasi Level II dievaluasi oleh Pengelola Kinerja Level I masing-masing.

Evaluasi atas AKIP dilaksanakan dengan penginputan mandiri komponen/subkomponen/kriteria beserta bukti evidence dan link evidence melalui Aplikasi Website Kinerjaku KKP dengan parameter dan bobot: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Mataram pada tahun 2025 ditargetkan tahunan dengan nilai 86.



Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah 83,6 dari target nilai 82 atau tercapai 101,95%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP sebesar Rp. 41.880.000 dan belum ada realisasi anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKS.10

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
82	83,56	-	82,05	83,6	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-

Ket.: Tahun 2022 tidak terdapat IKU tersebut/tidak dilakukan penilaian

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi anggaran.

Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan I tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%.

Rumus Perhitungan :

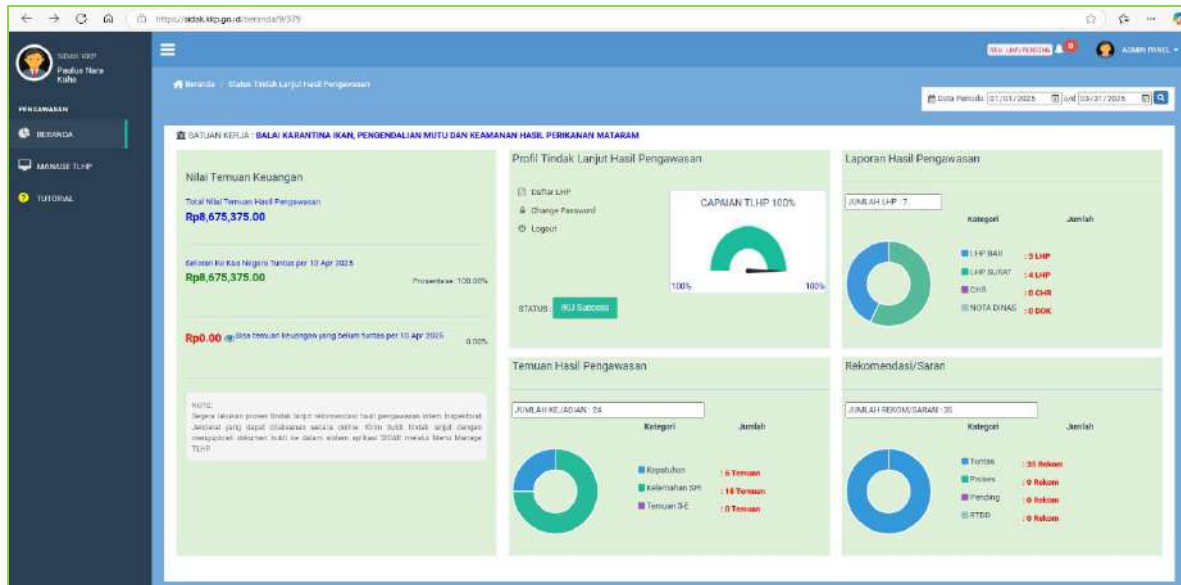
$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Gambar 3
Persentase TLHP Balai KIPM Mataram sampai dengan Triwulan I Tahun 2025



Penghitungan Realisasi Triwulan I tahun 2025:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKS.I

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 202	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	100	100	100	-	85	100	117,65	100	85	117,65	82	88	113,63

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$



Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 96,06% atau tercapai 120%.

Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP merupakan indikator baru di tahun 2025 dan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.042.677.000 dengan realisasi sebesar Rp. 414.281.007 atau tercapai 13,62%.

Perbandingan capaian indikator pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKS.12

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target
-	-	-	-	-	-	76	99,06	120	99,06	76	99,06	-	80	120

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.13. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Balai KIPM Mataram

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)



2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Indikator ini ditargetkan tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum terdapat capaian. Sedangkan pada tahun 2024 indikator kinerja ini tidak digunakan karena bukan merupakan UPT yang menjadi target.

Realisasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKS.13

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	88,90	88,90	-	-	-	-	-	75	-	-	1	-

Ket. : Tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat IKU tersebut

IKS.14. Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan



- Kelompok inovasi: umum, khusus
- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)
- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
- Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.
- IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
 - b. Target hasil: Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Inovasi dihitung dari:

Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 1 inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung indikator Inovasi Pelayanan Publik sebesar Rp. 56.000.000 dan belum ada realisasi

Perbandingan capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi IKS.14

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

Ket. : Tahun 2021 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut



IKS.15. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Balai KIPM Mataram

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Balai KIPM Mataram telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sertifikasi Ekspor Mutu pada triwulan I tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan I tahun 2025 dilakukan pada awal bulan Januari s/d akhir bulan Maret 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Balai KIPM Mataram minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.



Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk *QRcode* atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout *Qrcode* yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Balai KIPM Mataram.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan I tahun 2025 didapatkan sebanyak 24 (dua puluh empat) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut

Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram pada triwulan I tahun 2025 adalah 95,95 dari target 88 atau tercapai 109,03%. Sedangkan pada triwulan I tahun 2024 tercapai 88,23 dari target 84 atau tercapai 105,04%

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Balai KIPM Mataram dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 95,95 (Gambar 4) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.17 Kategorisasi Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Interval Indeks Persepsi	Konversi Interval Indeks Persepsi	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,1 - 4,0	88,31 – 100,00	(A) Sangat baik
2	2,1 - 3,0	76,61 – 88,30	(B) Baik
3	1,1 - 2,0	65,00 – 76,60	(C) Kurang baik
4	0,1 - 1,0	25,00 – 64,99	(D) Tidak baik

Gambar 4

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram Triwulan I Tahun 2025



Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Mataram	2025	1	5.00	95.95	24



Indikator ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70.520.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi IKS.15

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian thd Target TW I	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	94,69	92,61	97,71	-	88	95,95	109,03	95,95	88	109,03	-	85	103,8

Ket. : Tahun 2020 - 2021 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Balai KIPM Mataram, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.567758/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 dimana sumber dananya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 8.002.159.000 dan PNPB sebesar Rp 254.856.000.

Selama Triwulan I Tahun 2025 telah terjadi 2 kali revisi DIPA. Revisi I : revisi halaman III DIPA (pagu tetap) tanggal 04 Februari 2025, revisi II : revisi blokir anggaran kode "A" sebesar Rp.2.320.191.000 (pagu anggaran tetap) tanggal 21 Februari 2025.

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 1.381.325.675 atau mencapai 16,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.



Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBP, jumlah total penerimaan PNBP sampai triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.150.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 18,87%. Pencapaian PNBP tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga dengan adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SIAPMUTU serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.

Tabel 3.19 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan I T.A 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan manajemen internal lingkup BKIPM Mataram	7.782.015.000	1.376.325.675	17,69
2	Pengendalian mutu	280.000.000	3.500.000	1,25
3	Manajemen mutu	195.000.000	1.500.000	0,77
TOTAL		8.257.015.000	1.381.325.675	16,73

Tabel 3.20 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I T.A 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	4.309.058.000	962.914.854	22,35
2	Belanja Barang	3.947.957.000	418.410.821	10,60
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		8.257.015.000	1.381.325.675	16,73



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Mataram Triwulan I Tahun 2025 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Mataram selama dan/atau sampai triwulan I tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil analisis hasil penilaian kinerja, Balai KIPM Mataram telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 telah tercapai.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)/Skor Kinerja sebesar 114,62 dengan indikator warna biru yang berarti dalam kategori “ISTIMEWA” pada Aplikasi Kinerjaku KKP.

Dari 15 indikator kinerja di tahun 2025, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target di triwulan I dimana semua pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Pada Oktober 2024, dengan adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Hal ini mempengaruhi realisasi PNBPN tahun 2024 yang tidak dapat mencapai target karena terjadi pengurangan PNBPN dengan adanya pengalihan PNBPN untuk BKHIT yang merupakan PNBPN Karantina.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan target PNBPN pada seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Mataram dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Farchan**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	5.187.015.000
2.	Manajemen Mutu	130.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	186.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Mataram Tahun 2025		5.503.015.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)

CBIB

Target Sertifikat CBIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CBIB = 1 sertifikat

Persentase Capaian (A) = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

CPIB

Target Sertifikat CPIB = 0

Capaian Sertifikat CPIB = 0

Persentase Capaian (B) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CPPIB

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

Persentase Capaian (C) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CPOIB

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

Persentase Capaian (D) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CDOIB

Target Sertifikat CDOIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CDOIB = 1 sertifikat

Persentase Capaian (E) = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

CPIB Kapal

Target Sertifikat CPIB Kapal = 0

Capaian Sertifikat CPIB Kapal = 0

Persentase Capaian (F) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\%$$

$$= 100\% \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 8 April 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,



Ni Luh Anggra Lasmika



REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1.	23 Januari 2025	I-202501232054070009476	CV. BERKAT SAMUDRA BIRU	1002220059637	Udang Vannamei	17 Maret 2025 ID-CBIB-52-P-250027



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 8 April 2025
Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Grade	KOMODITAS	NOMOR SERTIFIKAT
1	PT. BINA SAN PRIMA	P1	Obat Ikan	ID-CDOIB-52-250003

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL (CPIB KAPAL) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI HACCP BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Tuna Loin	08-03-2025 & 36029/52/SKP/BK/III/2025
2	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Fresh Pelagic Fish (Bullet Tuna, Mahi-mahi, Shortfin Scad, Skipjack)	08-03-2025 & 36028/52/SKP/SG/III/2025
3	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Tuna	08-03-2025 & 36027/52/SKP/BK/III/2025
4	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Fresh Tuna Loin	08-03-2025 & 36026/52/SKP/SG/III/2025
5	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Fresh Tuna	08-03-2025 & 36025/52/SKP/SG/III/2025
6	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Fish Fillet	08-03-2025 & 36024/52/SKP/BK/III/2025
7	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Fresh Fish Fillet	08-03-2025 & 36023/52/SKP/SG/III/2025
8	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Mahi-mahi, Shortfin Scad, Skipjack)	08-03-2025 & 36022/52/SKP/BK/III/2025
9	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Cephalopods (Octopus, Squid)	08-03-2025 & 36021/52/SKP/BK/III/2025
10	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Frozen Demersal Fish (Giant Trevally, Grouper, Snapper, Spinefoot, Trigger Fish)	08-03-2025 & 36020/52/SKP/BK/III/2025
11	27 Januari 2025	CV. Lautan Mas	1402230053985	Fresh Demersal Fish (Giant Trevally, Grouper, Snapper, Spinefoot, Trigger Fish)	08-03-2025 & 36019/52/SKP/SG/III/2025

Mataram, 8 April 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

Ni Luh Anggra Lasmika

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM MATARAM
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram
Nama Timja	:	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100								
%Capaian	101,01								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi
• Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. • Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. • Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan; a. Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan b. Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor c. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap 6 Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan pada Unit Pengolahan Ikan UD. Andre Seafood, CV. Lautan Mas, PT. High Point Fisheries, UD. Amira, PT. Blue Ocean Lobster dan PT. Live Shell Indonesia, yang menghasilkan 6 Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS).
- Formulasi Perhitungan:

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

- Hasil Output:
A = Jumlah HC yang diterbitkan selama periode Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 21 HC
B = 0 (Tidak ada HC yang ditolak)

$$\begin{aligned} X &= \frac{A-B}{A} \times 100\% \\ &= \frac{21-0}{21} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- Dari perhitungan capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.
- Indikator ini mulai ada di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada triwulan IV tahun 2024 sehingga capaian indikator pada triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.000.000 yang digunakan untuk :
 - 1) Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Rp.5.000.000
 - 2) Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.15.000.000
 - 3) Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor Rp.8.000.000
 - 4) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Rp.25.000.000
- Realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian sebagai berikut: Jumlah SDM yang terlibat pada TW I sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

No.	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)
1	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	5.000.000	0	5.000.000
2	Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15.000.000	0	15.000.000
3	Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	8,000,000	0	8,000,000
4	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	25,000,000	0	25,000,000
JUMLAH		53.000.000	0	53.000.000

Akar Masalah

Adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem dan format baru (Aplikasi SIAPMUTU) sehingga diperlukan adanya perbaikan terkait masalah yang bisa saja muncul pada aplikasi yang masih dalam tahap penyempurnaan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

Pelayanan sertifikasi dan konsultasi pengguna jasa.



Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait sistem aplikasi baru.



Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya • Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait sistem aplikasi yang baru agar pelaku usaha lebih paham atas alur pelaksanaan penerbitan sertifikat maupun layanan yang ada. • Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik. • Agar tim pengembang aplikasi dari pusat segera menindaklanjuti setiap ada <i>bug</i> yang muncul.	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Kemanana Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya -	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Kemanana Hasil Perikanan

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

M. Farchan

Mataram, 8 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Ni Luh Anggra Lasmika



IKS.3 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram pada triwulan I 2025 = 21 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{21-0}{21} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Mataram, 8 April 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,



Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKAT EKSPOR BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN I TAHUN 2025

NO.	NO. AJU	TANGGAL AJU	TANGGAL EKSPOR	PENGIRIM	PENERIMA	NEGARA TUJUAN	NOMOR SERTIFIKAT
1	001	6 Januari 2025	8 Januari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 220004467
2	002	6 Januari 2025	10 Januari 2025	CV. WIJAYA	Hai Yi Xin Trade	China	B 240013890
3	003	6 Januari 2025	10 Januari 2025	CV. WIJAYA	Hai Yi Xin Trade	China	B 240013891
4	004	6 Januari 2025	10 Januari 2025	CV. WIJAYA	Hai Yi Xin Trade	China	B 240013892
5	005	13 Januari 2025	13 Januari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 220004468
6	006	13 Januari 2025	13 Januari 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002251
7	007	13 Januari 2025	17 Januari 2025	CV. WIJAYA	Hai Yi Xin Trade	China	B 240013893
8	008	20 Januari 2025	20 Januari 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002253
9	009	22 Januari 2025	24 Januari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 240013894
10	0010	1 Februari 2025	3 Februari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 220004469
11	0011	10 Februari 2025	11 Februari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 220004470
12	0012	17 Februari 2025	17 Februari 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002254
13	0013	22 Februari 2025	24 Februari 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 220004471
14	0014	24 Februari 2025	24 Februari 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002255
15	15	2 Maret 2025	5 Maret 2025	PT. Blue Ocean Lobster	Cheongkong	Hongkong	H 002256
16	1	12 Maret 2025	12 Maret 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002257
17	2	17 Maret 2025	19 Maret 2025	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000181
18	3	17 Maret 2025	19 Maret 2025	PT. Blue Ocean Lobster	Cheongkong	Hongkong	H 002258
19	4	19 Maret 2025	19 Maret 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002259
20	5	24 Maret 2025	24 Maret 2025	PT. High Point Fisheries	Hilo Fish Company	United States of America	F 250000566
21	6	26 Maret 2025	27 Maret 2025	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002260



Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 8 April 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,607,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%
22	BALAI KIPMHKP SEMARANG	2,236,942,000	1,046,512,000	1,190,430,000	0	1,190,430,000	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP GORONTALO	910,816,000	684,050,000	226,766,000	0	226,766,000	100.00%
24	BALAI KIPMHKP JAKARTA II	2,858,688,000	1,001,469,000	1,857,219,000	0	1,857,219,000	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP MERAK	1,654,275,000	995,923,000	658,352,000	0	658,352,000	100.00%
26	STASIUN KIPMHKP PANGKAL PINANG	1,871,554,000	864,822,000	1,006,732,000	0	1,006,732,000	100.00%
27	STASIUN KIPMHKP MERAUKE	1,566,920,000	798,865,000	768,055,000	0	768,055,000	100.00%
28	STASIUN KIPMHKP SORONG	556,662,000	217,925,000	338,737,000	0	338,737,000	100.00%
29	STASIUN KIPMHKP YOGYAKARTA	1,414,763,000	604,480,000	810,283,000	0	810,283,000	100.00%
30	STASIUN KIPMHKP CIREBON	2,929,266,000	1,306,538,000	1,622,728,000	0	1,622,728,000	100.00%

IKS.15 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Mataram-Tangkap Layar Aplikasi Susan KKP (ptsp.kkp.go.id)

Susan KKP

Balai KIPM Mataram

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Moneyv
- Resume Laporan Moneyv

PAGES

- Download
- Profile
- Logout

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Triwulan 1

2025

Submit

50 Data terakhir Tw 1/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

mataram

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Mataram	2025	1	5.00	95.95	24

Showing 1 to 1 of 1 entries

Download Data



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 14 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP

Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai "Sangat Baik" melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 3 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu:
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

- Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

- Persyaratan (U1) = 3,78
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76
- Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74
- Biaya/ Tarif (U4) = 3,77
- Produk layanan (U5) = 3,77
- Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67
- Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69
- Penanganan Pengaduan (U8) = 3,77
- Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74

Nilai terendah ada pada 3 unsur U6, U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel rekapitulasi per unsur)

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2025**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
28	Balai KIPM Surabaya II	92.86	A	Sangat Baik	107	Tercapai
29	Stasiun KIPM Tahuna	92.59	A	Sangat Baik	3	Tercapai
30	Balai KIPM Manado	92.40	A	Sangat Baik	38	Tercapai
31	Stasiun KIPM Padang	92.28	A	Sangat Baik	9	Tercapai
32	Stasiun KIPM Medan II	91.73	A	Sangat Baik	132	Tercapai
33	Balai KIPM Tarakan	91.55	A	Sangat Baik	24	Tercapai
34	Stasiun KIPM Palangkaraya	91.25	A	Sangat Baik	20	Tercapai
35	Balai KIPM Jakarta II	91.15	A	Sangat Baik	43	Tercapai
36	Balai KIPM Balikpapan	91.11	A	Sangat Baik	70	Tercapai
37	Balai Uji Standar KIPM	91.06	A	Sangat Baik	23	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	90.87	A	Sangat Baik	63	Tercapai
39	Balai KIPM Lampung	90.21	A	Sangat Baik	42	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	89.92	A	Sangat Baik	86	Tercapai
41	Stasiun KIPM Mamuju	89.48	A	Sangat Baik	14	Tercapai
42	Balai KIPM Surabaya I	89.43	A	Sangat Baik	143	Tercapai
43	Stasiun KIPM Merak	89.37	A	Sangat Baik	64	Tercapai
44	Stasiun KIPM Sorong	89.21	A	Sangat Baik	26	Tercapai
45	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.62	B	Baik	24	Tidak Tercapai
46	Stasiun KIPM Kendari	86.69	B	Baik	53	Tidak Tercapai
47	Stasiun KIPM Gorontalo	85.31	B	Baik	38	Tidak Tercapai

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Nama Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan I 2025**

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
2	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
3	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	84	3.83	3.8	3.8	3.82	3.83	3.79	3.82	3.83	3.82	95.4	A	Sangat Baik
4	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1451	3.81	3.8	3.79	3.8	3.79	3.74	3.74	3.81	3.77	94.57	A	Sangat Baik
5	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	202	3.82	3.78	3.72	3.8	3.78	3.54	3.62	3.79	3.8	93.45	A	Sangat Baik
6	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	503	3.77	3.77	3.71	3.75	3.76	3.62	3.65	3.78	3.75	93.21	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	92.22	A	Sangat Baik

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
8	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	3	3.67	3.33	3.67	4	4	3.33	3.33	4	3.67	91.67	A	Sangat Baik
9	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	10	3.8	3.3	3.7	3.6	3.7	3.3	3.8	3.8	3.8	91.11	A	Sangat Baik
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	208	3.64	3.56	3.55	3.63	3.65	3.53	3.54	3.63	3.58	89.77	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	24	3.88	3.54	3.58	3.71	3.71	3.38	3.33	3.67	3.42	89.47	A	Sangat Baik
12	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	4	3.75	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	88.19	B	Baik
13	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	11	3.73	3.64	3.36	3.36	3.55	3.36	3.55	3.36	3.64	87.63	B	Baik
14	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	45	3.42	3.42	3.38	3.42	3.42	3.38	3.33	3.42	3.36	84.88	B	Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		2553	3.78	3.76	3.74	3.77	3.77	3.67	3.69	3.77	3.74	93.58	A	Sangat Baik